

Siaran Pers

MENTERI BAMBANG: BAPPEDA HARUS MILIKI HELICOPTER VIEW

JAKARTA – Dalam acara Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia yang digelar di Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (6/10), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus mampu membaca situasi lokal secara menyeluruh sehingga mampu membuat kebijakan pembangunan pendorong pertumbuhan ekonomi. “Bappeda harus memiliki *helicopter view* agar bisa memetakan isu secara komprehensif dan membidik pembangunan yang paling bermanfaat bagi masyarakat,” ujar beliau kepada para kepala dan perwakilan 33 Bappeda Provinsi yang menghadiri forum tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri Bambang mengutarakan tiga poin utama yang patut dicermati Bappeda agar akselerasi pembangunan berjalan dengan baik. Pertama, Bappeda harus berperan sebagai penentu arah dan kecepatan pembangunan daerah. Selain menyusun perencanaan pembangunan yang multi-sektoral, Bappeda juga harus aktif memberi saran dan rekomendasi strategis yang dapat berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah, semisal mendorong pemerintah daerah untuk lebih mengkaji efektivitas pemekaran daerah. Pasalnya, sering kali, *fixed cost* pemekaran daerah, yakni dana untuk membuat organisasi pemerintahan dan sejumlah dinas baru, memakan anggaran yang sangat besar. Dengan demikian, *variable cost* pemekaran daerah, yaitu biaya untuk membangun infrastruktur misalnya, justru tergerus oleh *fixed cost*. “Bappeda harus analitis dan memberi masukan kepada kabupaten/provinsi agar tidak berpikir pemekaran demi transfer anggaran,” ungkap beliau.

Kedua, Bappeda, sebagai institusi yang paling tepat untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang cocok dan sesuai dengan karakteristik lokal, harus berperan lebih dalam mewujudkan desentralisasi ekonomi. Pasalnya, menurut Menteri Bambang, daerah sangat jarang menginisiasi kegiatan ekonomi karena masih mengikuti pemerintah pusat. Padahal, agar pembangunan sukses, daerah harus memahami betul kekuatan lokal yang menjadi fokus utama pembangunan. Daerah yang memutuskan untuk menekankan pada pertanian, misalnya, dapat menjadi sentra jagung, kedelai, atau sentra bawang, sesuai dengan komoditas yang ada di daerah masing-masing. Namun, patut diingat, dalam berkreasi menyusun strategi kebijakan pembangunan ekonomi khas lokal, Bappeda harus tetap berpedoman pada strategi pencapaian ekonomi nasional.

Ketiga, dari sudut pandang administratif birokrasi, Bappeda juga harus mampu menciptakan iklim kerja yang baik agar sumber daya manusia yang berkualitas tetap berkarya bagi daerah. Sebagai motor percepatan pembangunan daerah, Bappeda wajib menjaga perencanaan fungsional yang mampu melihat aspek pembangunan daerah dari sudut pandang multidimensi untuk tetap merumuskan pembangunan daerah. Kualitas sumber daya manusia juga harus terus ditingkatkan dengan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kontribusi yang diberikan dapat berlipat ganda.

Menteri Bambang juga menjelaskan bahwa peran Bappeda dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan dapat diwujudkan dengan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat. Alih-alih fokus pada konsumsi, daerah harus fokus pada investasi yang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Bappeda harus fokus pada pembelanjaan anggaran untuk program dan kegiatan yang mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di dalam masyarakat. Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Bappeda juga harus menyertakan indikator dan target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengingat gol pembangunan berkelanjutan tersebut juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Menutup acara, Menteri Bambang menekankan agar diskusi yang berlangsung dalam forum tersebut dapat dilanjutkan dengan komunikasi informal yang intensif sehingga perencanaan pembangunan yang baik dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional dapat terwujud. “Pesan saya, sekali lagi, Bappeda seharusnya tidak hanya sekadar menjadi *think tank* pemerintah daerah, tetapi Bappeda juga harus bisa menentukan arah pembangunan daerah dan menjaga kecepatan pembangunan,” tegas beliau.



Jakarta, 6 Oktober 2016

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile
(021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id